

Pengembangan Mutu Pendidikan Di Negara Berkembang

Zainal Panani¹, Akhyak², Asy'aril Muhajir³, Nur Effendi⁴

¹⁻⁴ UIN Sayyid Ali Rahmatulullah ,Tulungagung

Korespondensi : kemenagzainal@gmail.com

Abstract: *The purpose of writing this article is to determine the development of education quality in developing countries. This research uses a type of library research. Library research is research carried out by reviewing various journals and related reference books. The results of his research show that quality education is education that can produce students who have abilities, insight and skills in accordance with established standards, so that they have sufficient opportunities to be competent in any job market without ignoring the moral aspects of their lives. A developing country is a country with a low average income, relatively underdeveloped infrastructure, and a human development index that is poor compared to global norms. Educational policies in developing countries generally originate from the legacy of colonial educational policies. It is said this because developing countries when they first became independent had not yet developed their own educational policies based on the realistic needs of their people. The independence that has been achieved in the political field is not automatically followed by independence in other fields, especially in the field of education. The causes of the low quality of education in developing countries are, 1) lack of qualified teachers, 2) failure of schools to care for students, in fact elementary schools are less effective in supporting the development movement, if the impact is not proven within an appropriate period of time, 3) poor state of the curriculum. not appropriate. The basic problems of the curriculum at the pre-university level include the expansion of cultural adaptation, localization and vocationalization of the curriculum, 4) Inequality in rural and urban progress.*

Key words: *quality development, developing countries, education*

Abstract: Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pengembangan mutu pendidikan di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbagai jurnal dan buku-buku referensi terkait. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan, wawasan, dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memiliki peluang yang cukup untuk berkompetensi di pasar kerja manapun dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam kehidupannya. Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Kebijaksanaan pendidikan di negara-negara berkembang umumnya berasal dari warisan kebijaksanaan pendidikan kaum kolonial. Dikatakan demikian oleh karena negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum semat membangun kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistik rakyatnya. Kemerdekaan yang telah tercapai di bidang politik tidak dengan sendirinya diikuti oleh kemerdekaan di bidang lainnya, lebih-lebih di bidang pendidikan. Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Negara Berkembang adalah, 1) Kurangnya guru yang kualifikasi, 2) Kegagalan sekolah dalam memelihara siswa sebenarnya sekolah-sekolah dasar kurang efektif dalam menunjang gerak pembangunan, jika impaknya tidak terbukti dalam periode waktu yang pantas, 3) Keadaan kurikulum yang tidak sesuai permasalahan dasar kurikulum pada jenjang pra-universitas meliputi sekitar perluasan penyesuaian budaya, pendaherahan(loklisasi), dan penjuruan (vokasionalisasi) kurikulum, 4) Ketimpangan kemajuan desa dan kota.

Kata kunci: Pengembangan mutu, Negara berkembang, Pendidikan

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia sekarang ini sungguh mengkhawatirkan, bahkan di tingkat Asia Tenggara saja tak mampu bersaing, Indonesia termasuk terendah dari 7 negara di Asia Tenggara, bahkan mutu Pendidikannya di bawah Malaysia bahkan Vietnam yang merdeka baru beberapa tahun. Padahal dulunya Malaysia belajar dari kita untuk meningkatkan mutu

pendidikan di negaranya, tetapi sekarang jauh meninggalkan kita, sungguh ironi dan tamparan yang cukup menyakitkan.

Menurut penelitian pada tahun 2005 Indonesia menempati ranking 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Thailand yang dilanda krisis justru menempati ranking pertama kemudian disusul Malaysia, Sri Lanka, Filipina, Cina, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Kep. Solomon, dan Pakistan. Indonesia mendapat nilai 42 dari 100 dan memiliki rata-rata E. Untuk aspek penyediaan pendidikan dasar lengkap, Indonesia mendapat nilai C dan menduduki peringkat ke 7. Pada aspek aksi negara, RI memperoleh huruf mutu F pada peringkat ke 11. Sedangkan aspek kualitas input/pengajar, RI diberi nilai E dan menduduki peringkat paling buncit alias ke 14. Indonesia hanya bagus pada aspek kesetaraan jender B dan kesetaraan keseluruhan yang mendapat nilai B serta mendapat peringkat 6 dan 4.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbagai jurnal dan buku-buku referensi terkait, yang pada akhirnya dapat dianalisis dan disimpulkan dari berbagai sumber yang didapatkan oleh peneliti tersebut. Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berorientasi pada gejala alamiah yang terjadi dan penelitian ini tidak dilakukan di laboratorium. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dimana peneliti mengumpulkan kata-kata bukan berupa serangkaian angka untuk penelitian ini yang pada intinya kata-kata tersebut bisa memberikan gambaran atau menyajikan permasalahan dan pemecahan masalah yang ada. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis isi, dimana dalam analisis lebih mengedepankan pada menguraikan isi dari berbagai proposisi yang telah ada yang terlahir dari berbagai teori dan analisis sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mutu Pendidikan

Mutu dalam kamus populer memiliki arti: kualitas; derajat; tingkat; manikam, mutiara.¹ Seperti halnya yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik buruk sesuatu atau mutu sesuatu.² Dalam kamus manajemen (mutu), mutu adalah “Tingkat

¹ M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 505.

² Quraish. Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1999), 280

dimana sejumlah karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan-persyaratan.”³ Menurut Tom Peter dan Nancy Austin, dalam bukunya “*A passion for excellence*”, mutu merupakan “sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri”.⁴ Sedangkan menurut Jarome S. Arcaro menegaskan bahwa mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu bukanlah benda magis atau sesuatu yang rumit, mutu didasarkan pada akal sehat.⁵

Menurut Jarome, saat membicarakan masalah perbaikan mutu pendidikan, seringkali yang dibicarakan adalah perbaikan peringkat kenaikan kelas atau nilai rapor. Dalam sekolah yang bertipe seperti itu, tanggung jawab perbaikan mutu pendidikan lebih banyak ada pada guru.⁶ Secara umum, para guru hanya terfokus pada aspek pendidikan seorang siswa; membantu siswa belajar dan mendapatkan pengetahuan. Ia memaknai mutu dengan dua tipologi, yakni mutu dengan m-kecil; dimisalkan seperti seorang guru yang telah lama menerapkan mutu namun hanya bersifat instrumental dalam mengembangkan mutu dan memberikan pembinaan terhadap guru-guru lain, dimana banyak diantara teman-teman mereka enggan menerima tantangan mutu.⁷ Sebaliknya, Mutu dengan M-besar; membuat setiap orang bertanggung jawab pada mutu. Orang dilengkapi dengan alat yang dibutuhkan untuk mengubah cara kerjanya untuk memperbaiki mutu keluaran mereka.⁸ Setiap orang bertanggung jawab mengurangi pemborosan dan melakukan efisiensi. Sebagai hasil upaya tersebut, mereka menciptakan pembelajaran dan lingkungan kerja (mengajar) yang lebih baik.

Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.⁹ Menurut Supranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.¹⁰ Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.¹¹ Kualitas pendidikan menurut Ace

³Syahu Sugian, *Kamus Manajemen (Mutu)*, (Jakarta: Gramedia, 2006), 180.

⁴Edwar Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 29.

⁵Jarome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Jakarta: Yogyakarta, 2007), 75.

⁶*Ibid.*, 76-77.

⁷*Ibid.*, 77.

⁸*Ibid.*, 78.

⁹Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Daerah Diseminasi oleh A. Supriyanto, November 1997, Jilid 4, IKIP, 1997, 225

¹⁰Supranta. J, *Metode Riset*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 288

¹¹Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offcet, 1995), 51

Suryadi dan H.A.R Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.¹²

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, EBTA atau UN. Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya.¹³ Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu

¹²Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993), 159

¹³Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktorat Pendidikan Menengah dan Umum, Jurnal, April, 1999, 4

itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.¹⁴

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

Dalam definisi umum, mutu mengandung makna “derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik itu berupa barang atau jasa”.¹⁵ Barang dan jasa dalam pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Dalam konteks pendidikan, Menurut Sudarmawan Danim, pengertian mutu mengacu pada “masukan, proses, hasil dan administratif. Mutu dalam hal masukan dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:

1. Kondisi baik dan tidaknya sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboratorium, staf tata usaha, dan siswa.
2. Memenuhi dan tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana dan prasarana, dan lain-lain.
3. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja.
4. Mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, misi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.¹⁶

Mutu proses, yakni terletak pada pembelajaran, mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hal-hal yang termasuk dalam kerangka mutu proses pendidikan ini adalah derajat kesehatan, keamanan, disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan dan lain-lain dari subyek selama member dan menerima jasa layanan. Oleh sebab itu, manajemen sekolah dan manajemen kelas berperan penting dalam mensinkronkan berbagai masukan tersebut atau menyinergikan semua komponen dalam

¹⁴Abdul Chafidz, Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya, MPA No. 142, Juli 1998, 39

¹⁵Sudarmawan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 53.

¹⁶ *Ibid.*, 53.

interaksi belajar dan mengajar.¹⁷

Mutu hasil, yaitu hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk suatu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Dimana keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Dan di luar kerangka itu mutu hasil juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.¹⁸

Mutu administratif, yaitu mutu sebuah madrasah dapat dilihat dari tata tertib administrasinya. Salah satu bentuk tertib administrasi adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertical maupun horizontal. Jika ditinjau dari segi manajemennya, madrasah dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja secara efektif dan efisien. Bekerja bukan karena ada beban atau karena diawasi secara ketat. Dan proses pekerjaannya pun dilakukan dengan benar dari awal, bukan mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena kekeliruan yang tidak disengaja.

Mutu adalah suatu keinginan pelanggan yang selama ini kurang dikelola. Dalam kenyataannya manajemen mutu juga kurang digunakan sampai tahun 1980-an, melainkan pengendalian mutu dan kepastian mutu yang digunakan. Mutu yang tinggi adalah kunci kebanggaan, produktivitas dan kemampuan bacaan, tujuan mutu merupakan produk dan jasa yang dapat memuaskan terhadap pelanggan. Agar dapat berhasil aktivitas mutu harus didukung oleh manajemen dan berorientasi konsumen, dukungan manajemen, tenaga kerja dan pemerinyah untuk perbaikan mutu adalah usaha yang strategis yang sangat penting terhadap produk dan kepemimpinan proses jasa.

Komitmen terhadap mutu adalah suatu sikap yang diformulasikan dalam ruang kantor dan tempat tinggal, yang dapat dilihat pada bagian lembaga, yang dinyatakan di ruang konser dan ruang kota. Mutu memerlukan suatu proses perbaikan yang terus menerus dengan individual yang dapat diukur. Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan, komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana-prasarana dan biaya. Mutu pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu daya saing bangsa, sehingga untuk dapat tetap bisa bertahan dalam percaturan global, maka pendidikan yang bermutu mutlak diperlukan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional, dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia (menyeluruh).

¹⁷ *Ibid.*, 54.

¹⁸ *Ibid.*, 53-54.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.¹⁹

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Menurut Sagala peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu: (1) peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis, untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, (2) peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada ketrampilan hidup esensial, yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata, dan bermakna

Lebih lanjut Sagala menyatakan, bahwa lembaga pendidikan (sekolah) dapat dikatakan bermutu, apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam; (1) prestasi akademik, yaitu nilai raport dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan, (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya, dan (3) memiliki tanggungjawab yang tinggi, dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk ketrampilan, sesuai dengan standar ilmu yang diterimanya di sekolah.²⁰ Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan, wawasan, dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memiliki peluang yang cukup untuk berkompetensi di pasar kerja manapun dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam kehidupannya.

2. Negara Berkembang

Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin.

Perkembangan mencakup perkembangan sebuah infrastruktur modern (baik secara fisik maupun institusional) dan sebuah pergerakan dari sektor bernilai tambah rendah seperti agrikultur dan pengambilan sumber daya alam. Negara maju biasanya memiliki sistem ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menahan-sendiri. Penerapan istilah ‘negara berkembang’ ke seluruh negara yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu Negara yang tidak

¹⁹UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 7.

²⁰Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 170.

mengalami pertumbuhan situasi ekonominya, dan juga telah mengalami periode penurunan ekonomi yang berkelanjutan.²¹

3. Kebijakan Pendidikan di Negara Berkembang

Kebijakan pendidikan di negara-negara berkembang umumnya berasal dari warisan kebijaksanaan pendidikan kaum kolonial. Dikatakan demikian oleh karena negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum semat membangun kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistik rakyatnya. Kemerdekaan yang telah tercapai di bidang politik tidak dengan sendirinya diikuti oleh kemerdekaan di bidang lainnya, lebih-lebih di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya pun dapat dipastikan bahwa seluruh kebijaksanaan pendidikan di negara berkembang yang merupakan negara yang masih mencari bentuk serta pola kebijaksannya sendiri tentunya selalu belajar terhadap negara-negara kolonial utamanya yang telah sangat maju dibandingkan negaranya sendiri. Hal ini telah menunjukkan bahwa negara berkembang tidak serta merta meninggalkan begitu saja bentuk-bentuk kebijaksanaan yang dibawa oleh negara-negara kolonial, melainkan masih mungkin dipakai dan di terapkan dalam mengatur kebijaksanaan pendidikan di negaranya.

Kebijakan yang merupakan warisan dari kaum kolonial yaitu:

Pertama, sifatnya yang elastis, atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada sekecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakat. Realitas demikian tampak mula-mula pada awal-awal kemerdekaan terutama dalam hal kesempatan mendapatkan layanan pendidikan, meskipun pengejawantahannya akhirnya lebih bersentuhan dengan persoalan mutu pendidikan. Tampak sekali, bahwa layanan pendidikan yang bermutu, tetap dinikmati oleh kalangan terbatas, sementara kalangan kebanyakan sekadar mendapatkan layanan pendidikan yang dari segi kualitas sangat memprihatinkan. Keluhan mengenai mutu pendidikan yang akhir-akhir ini pernah mencuat ke permukaan, agaknya dapat dilihat dari sudut pandang ini.

Kedua, berorientasi sosio-ekonomik. Orientasi sosio-ekonomik demikian, berkaitan erat dengan jaringan ekonomi internasional di mana negara-negara maju berposisi sebagai sentranya sementara negara-negara berkembang sekadar sebagai periferalnya. Dalam kedudukan sebagai periferalnya, negara berkembang umumnya secara ekonomik masih tinggi tingkat dependensinya terhadap negara maju. Bantuan-bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman bagi pelaksanaan pendidikan di negara-negara berkembang, umumnya justru memperkuat dependensi tersebut. Jika secara ekonomik hal demikian masih bergantung dan belum mandiri, maka dalam hal strategi pencapaian tujuan pendidikannya pun juga masih tetap bergantung. Tidak jarang, pembaruan-

²¹ Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Proses, Produk dan Masa Depan)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 78

pembaruan di bidang pendidikan, umumnya dimulai dari negara maju; dan begitu di negara maju sudah ditinggalkan, baru dimulai dan di galakkan di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang seolah-olah terombang-ambing oleh pasang surutnya, naik turunnya dan jaya hancurnya konsep-konsep mengenai pendidikan di negara-negara maju.

Ketiga, liberal, rasional, individual, achievement oriented dan sosial alienated. Ciri-ciri pendidikan demikian, umumnya berbeda dan bahkan berlawanan dengan ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di negara-negara berkembang. Pendidikannya liberal, padahal masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kolektifisme; pendidikannya menanamkan rasionalitas, padahal masyarakat negara-negara berkembang banyak juga mempunyai budaya-budaya yang tidak saja mengembangkan rasionalitas melainkan juga segi-segi emosional dan batiniah; pendidikannya individual padahal masyarakatnya menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial dan gotong royong; pendidikannya achievement oriented secara sempit sekadar prestasi akademik di kelas; pendidikannya sosial alienated padahal masyarakatnya menginginkan sosialisasi siswa dengan lingkungannya.

Keempat, tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat. Hal demikian sangat memprihatinkan, oleh karena pendidikan pada dasarnya adalah pewarisan budaya dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya atau penerusnya. Oleh karena tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat, maka para siswanya bisa mengalami keterasingan budaya.

Kelima, berorientasi pada masyarakat kota. Ini juga sangat memprihatinkan mengingat sebagian besar wilayah negara-negara berkembang justru terdiri dari pedesaan. Orientasi ke kota demikian, lambat atau cepat, langsung maupun tidak langsung, bisa menjadikan penyebab lulusan-lulusan pendidikan lebih tertarik dengan kehidupan kota ketimbang bangga membangun desanya. Tingginya angka perpindahan penduduk ke kota-kota besar, yang lazim menimbulkan efek-efek sampingan sosial, agaknya juga dapat dilihat dari sudut pandang ini.

Berkenaan dengan kenyataan-kenyataan demikian inilah, Winarno Surachmad, melalui majalah Prisma (1986) pernah menggugat, apakah sudah tiba waktunya kita membangun sistem pendidikan yang dirancang dari, oleh dan untuk dunia ketiga, atau negara-negara berkembang. Sebab, tidak hanya kontroversi-kontroversi yang dikemukakan oleh Mas Achmad Icksan diatas mewarnai pendidikan di negara-negara berkembang, melainkan yang juga tidak kalah penting adalah, bahwa persoalan negara dan bahkan kependidikan negara-negara barat dan maju, sudah tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan ilmu kependidikan mereka sendiri.²²

Responsi atas kenyataan demikian, tak ada cara lain kecuali negara berkembang itu sendiri, mempunyai tekad dan keberanian serta mewujudkan tekad dan keberanian tersebut

²² Winarno Surachmad, „*Ilmu Kependidikan Untuk Pembangunan: Sebuah Kebutuhan Strategik Dunia Ketiga*”, dalam Prisma, No.3/1986. (Jakarta: LP3ES, 1986), 28

secara nyata untuk membangun sistem dan kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan objektif rakyatnya. Apapun sistem yang dibangun, jika didasarkan atas kebutuhan riil rakyatnya, tentu relatif kebutuhan realistis bangsa lain; apalagi hanya sekedar mengadopsi sistem bangsa lain yang cara membangunnya juga berdasarkan kebutuhan realistis bangsa lain tersebut.

Harusnya disadari oleh negara berkembang sendiri, bahwa mengeksporan sistem pendidikan yang dilakukan oleh negara maju, tentu tak semata secara murni ingin membebaskan negara berkembang dari keterbatasan; melainkan ada misi lain, misal didapatkannya nilai tambah mengenai beberapa hal untuk negara maju sendiri. Persyaratan-persyaratan yang dikenakan negara-negara maju atas negara-negara berkembang atas bantuan-bantuan pendidikannya, seringkali menempatkan negara berkembang pada posisi tak untung sementara negara maju sendiri masih tetap berada diatas angin. Karena itu, pembangunan sistem pendidikan yang didasarkan atas budaya, kemampuan, kebutuhan objektif negara berkembang sendiri adalah suatu kebutuhan mendasar yang akan memberikan kejayaan kepada negara berkembang sendiri di masa depan.

4. Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Negara Berkembang

Beberapa masalah dan kesulitan dalam uraian pokok secara garis besar adalah sebagai berikut:²³

1. Kurangnya guru yang kualifikasi. Beberapa Negara terbelakang sangat sedikit orang-orang yang memiliki pendidikan cukup untuk menjadi guru yang kompeten, karena mereka menempati jabatan-jabatan diluar bidang pengajaran dengan gaji dan prestise social yang tinggi. Sejak negara-negara terbelakang melakukan ekspansi pendidikan, maka harus berusaha mendapatkan guru-guru dari Negara maju. Walaupun hal itu bertentangan dengan watak nasionalistis, namun tampaknya itu merupakan satu-satunya jalan keluar.
2. Kegagalan sekolah dalam memelihara siswa sebenarnya sekolah-sekolah dasar kurang efektif dalam menunjang gerak pembangunan, jika impaknya tidak terbukti dalam periode waktu yang pantas. Cita-cita sekolah pada mulanya sukar meresap dan beberapa factor kerja menghalanginya. Anak mungkin merupakan suatu keuntungan ekonomi bagi orang tua, dan sekolah. Rupa-rupanya dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kenyataan keuntungan ini: naitu orang tua khawatir, bahwa ilmu pengetahuan dan ide-ide baru itu bias mengasingkan anak dari kebiasaan-kebiasaan tradisional keluarga. Agar efektif sekolah-sekolah itu dihadiri secara teratur dan bersemangat, sekolah itu harus menjadi tempat yang menyenangkan dan menguntungkan hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak biasa ditemui dinegara miskin.

²³ Bukhari Umar. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Batusangkar: Amzah, 2010), 78

3. Keadaan kurikulum yang tidak sesuai permasalahan dasar kurikulum pada jenjang pra-universitas meliputi sekitar perluasan penyesuaian budaya, pendaherahan (lokalisasi), dan penjuruhan (vokasionalisasi) kurikulum.
4. Ketimpangan kemajuan desa dan kota. Didunia terbelakang terapat jurang perbedaan yang lebar, yaitu kesenangan, kekayaan, kegembiraan, dan tebaran kelayakan terdapat di beberapa puasat kota dan didesa atau tribal areas keterbelakangan meluas. Perbedaan yang kontras antara gedung-gedung modern, jalan-jalan raya, transportasi dan aktivitas budaya disebagian kota besar dan desa itu mengundang gaya tarik wisatawan yang mengunjungi Negara yang kurang maju itu.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di dunia berkembang secara umum, yaitu:²⁴

1. Efektifitas Pendidikan

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.

Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain.

Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Negara berkembang.

2. Efisiensi Pengajaran Di Negara Berkembang

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih 'murah'. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati.

²⁴ Tilaar A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 45

Beberapa masalah efisiensi pengajaran adalah mahal biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik.

Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih.

Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

3. Standardisasi Pendidikan

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, kita juga berbicara tentang standardisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya kerangka terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Penyebab rendahnya mutu pendidikan juga tentu tidak hanya sebatas yang kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Tentunya hal seperti itu dapat kita temukan jika kita menggali lebih dalam akar permasalahannya. Dan semoga jika kita mengetahui akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan sehingga jadi lebih baik lagi.

4. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

5. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal

39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

6. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.

7. Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.

8. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

9. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan

Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

10. Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”.

Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

KESIMPULAN

1. Mutu adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan, wawasan, dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memiliki peluang yang cukup untuk berkompetensi di pasar kerja manapun dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam kehidupannya.
2. Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global.
3. Kebijaksanaan pendidikan di negara-negara berkembang umumnya berasal dari warisan kebijaksanaan pendidikan kaum kolonial. Dikatakan demikian oleh karena negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum semat membangun kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistik rakyatnya. Kemerdekaan yang telah tercapai di bidang politik tidak dengan sendirinya diikuti oleh kemerdekaan di bidang lainnya, lebih-lebih di bidang pendidikan.
4. Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Negara Berkembang adalah, 1) Kurangnya guru yang kualifikasi, 2) Kegagalan sekolah dalam memelihara siswa sebenarnya sekolah-sekolah dasar kurang efektif dalam menunjang gerak pembangunan, jika impaknya tidak terbukti dalam periode waktu yang pantas, 3) Keadaan kurikulum yang tidak sesuai permasalahan dasar kurikulum pada jenjang pra-universitas meliputi sekitar perluasan penyesuaian budaya, pendaherahan(loklisasi), dan penjuruan (vokasionalisasi) kurikulum, 4) Ketimpangan kemajuan desa dan kota.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Poluper*, Surabaya: Arloka, 1994
- Arcaro, Jarome S. *Pendidikan Berbasis Mutu*, Jakarta: Yogyakarta, 2007
- Chafidz, Abdul. *Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya*, MPA No. 142, Juli 1998
- Danim, Sudarmawan. *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (Proses, Produk dan Masa Depan)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Daerah Diseminasi oleh A. Supriyanto, November 1997, Jilid 4, IKIP, 1997
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1999
- Sugian, Syahu. *Kamus Manajemen (Mutu)*, Jakarta: Gramedia, 2006
- Supranta. J, *Metode Riset*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997
- Surakhmad,. Winarno. "*Ilmu Kependidikan Untuk Pembangunan: Sebuah Kebutuhan Strategik Dunia Ketiga*", dalam Prisma, No.3/1986. Jakarta: LP3ES, 1986
- Suryadi, Ace dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993
- Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Tilaar A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andi Offcet, 1995
- Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktorat Pendidikan Menengah dan Umum, Jurnal, April, 1999
- Umar. Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam*.Batusangkar: Amzah, 2010
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sisdiknas*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003